

**BIMTEK  
VENDOR**

---

**PENGADAAN  
BARANG DAN JASA**

di Lingkungan Kemendikbud

---

Biro Umum – Setjen Kemendikbud



# Dasar Hukum

**Peraturan Presiden No. 54**

**Tahun 2010**

Tentang ...  
Barang dan ...  
Pemerintah

**2010**

**Peraturan Presiden No. 70**

**Tahun 2012**

Tentang ...  
Kedua ...  
Presiden ...  
Tahun ...  
Peraturan Bar ...  
Jasa Pemerintah

**2012**

**Peraturan Presiden No. 4**

**Tahun 2015**

Tentang ...  
Keempat ...  
Nomor 54 ...  
Tahun 2010 ...  
Pengada ...  
Jasa Pemerintah

**2015**

**Peraturan Presiden No. 35**

**Tahun 2011**

Tentang Per ...  
Peraturan Pre ...  
Nomor 54 Tahun ...  
tentang Peng ...  
Barang dan ...  
Pemerintah

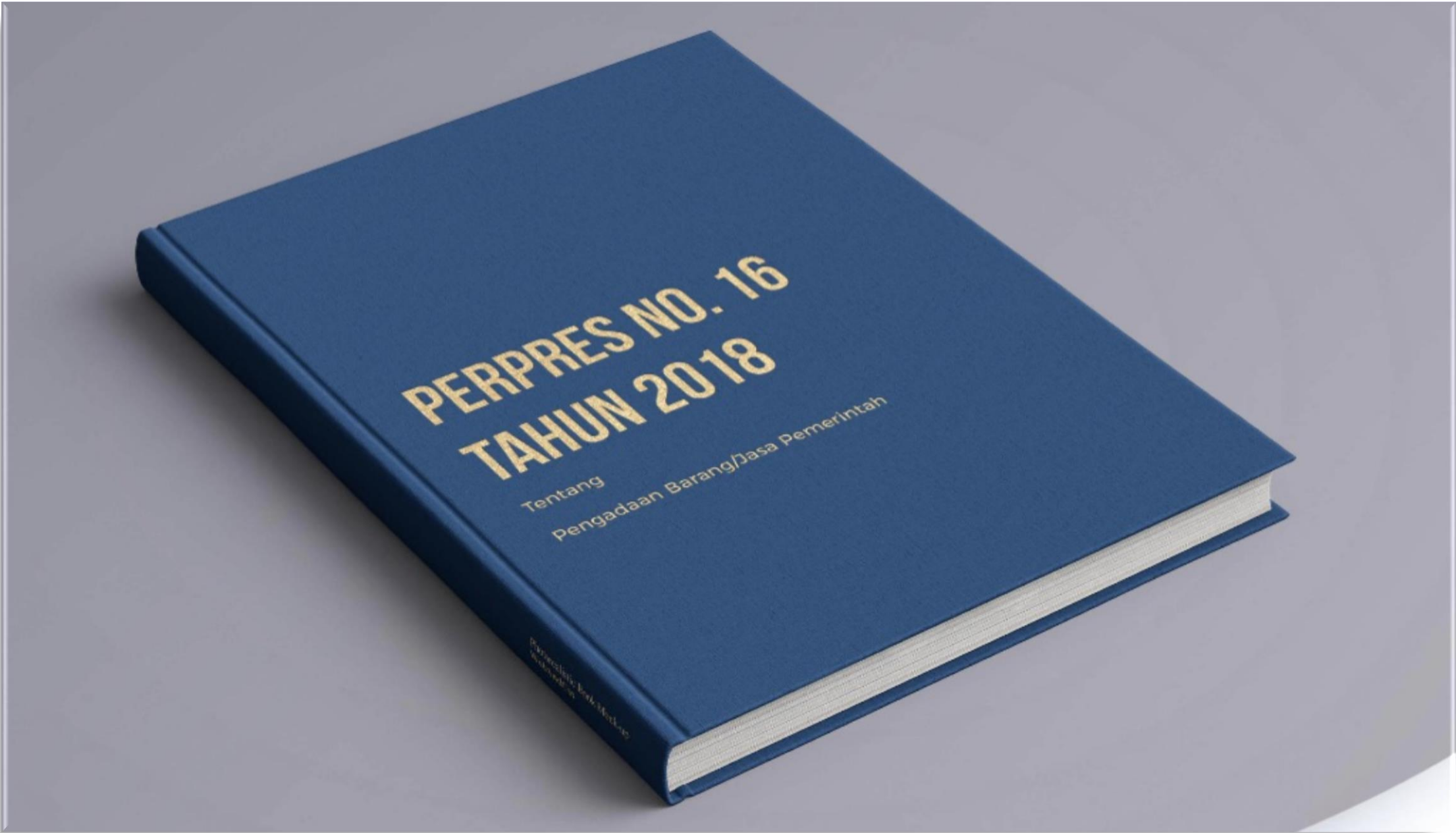
**2011**

**Peraturan Presiden No. 172**

**Tahun 2014**

Tentang Per ...  
Ketiga Atas Pe ...  
Presiden No ...  
Tahun 2010 ...  
Pengada ...  
Jasa Pemerintah

**2014**



**PERPRES NO. 16  
TAHUN 2018**

Tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden  
Republik Indonesia

# PERATURAN



**LKPP**  
Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1	JENIS DAN URAIAN BARANG/JASA
2	AGEN PENGADAAN
3	PERENCANAAN PENGADAAN
4	KONSOLIDASI PENGADAAN
5	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN SWAKELOLA
6	PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
7	PENETAPAN JENIS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
8	METODE PEMILIHAN PENYEDIA
9	METODE EVALUASI PENAWARAN
10	METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
11	KUALIFIKASI PENYEDIA
12	JADWAL PEMILIHAN PENYEDIA
13	DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA
14	PELAKSANAAN PEMILIHAN MELALUI PENYEDIA
15	PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
16	PENGECUALIAN
17	TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL
18	KATALOG ELEKTRONIK DAN/ATAU E-PURCHASING
19	SUMBER DAYA MANUSIA
20	KELEMBAGAAN
21	SANKSI
22	PENYELENGGARAAN DAFTAR HITAM NASIONAL
23	LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA
24	PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA



**PERATURAN**  
MENTERI  
DALAM NEGERI

DOKUMEN PENDUKUNG  
**KONTRAK**



**PERATURAN**  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

1	BENTUK KONTRAK DAN DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK
2	PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PENYEDIA UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN



**PERATURAN**  
MENTERI RISET  
DAN  
PENDIDIKAN  
TINGGI

PELAKSANAAN PENELITIAN

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI**

PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LUAR NEGERI



# VIDEO CONFERENCE

**Sosialisasi Perpres 16/2018**  
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa



Senin, 26 Maret 2018  
Pukul 13.00 WIB

Akses : psmk.webex.com  
Number Meeting : 577 734 494  
Password : 12345

<http://tinyurl.com/panduanvicon2018>



**Fadli Arif\***  
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum  
*\*dalam konfirmasi*



**Khalid Mustafa**  
Procurement Specialist

Informasi :  
P : 0852 1228 8068 (Whatsapp)  
E : pengadaan@kemdikbud.go.id

- Pengadaan Kemdikbud
- Pengadaan\_kemdikbud
- Pengadaan Kemdikbud
- PBJ\_Kemdikbud



Video Confrence Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

31 sedang menonton

- 0
- 0
- Bagi
- Laporkan
- Download

Pengadaan KEMDIKUD  
112 subscriber

DISUBSCRIBE



**LIVE STREAMING**  
Proses Video Conference Perpres 16/2018 Pengadaan Barang dan Jasa

## E-marketplace



<http://bit.do/perpres162018>

Unduh Perpres No. 16/2018

Unduh Gambaran Perpres No. 16/2018

Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Mind Mapping Perpres No. 16/2018

Matriks perbedaan Perpres 54/10 vs 16/18

Artikel Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Video Conference Sosialisasi Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Turunan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

## Info Grafis Terbaru



## Admin Agency SIMPEL Kemendikbud



1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional
5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog
6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

<http://bit.do/per-LKPP>



#### Keputusan Deputi:

1. [Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#)
2. [Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik](#)



#### Rendahnyanya Penyerapan Dana

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows.

#### Video Terbaru

## 07 REPEAT ORDER



Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*Repeat Order*) melalui proses Penunjukan Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali

# 08 E-REVERSE AUCTION

## MERUPAKAN

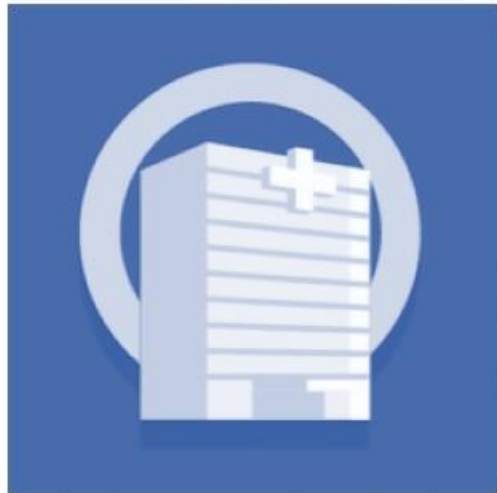
Metode penawaran harga secara berulang

## DAPAT DIGUNAKAN :

- pada tender cepat;
- sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran;



# 09 PENGECUALIAN



PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKSANAKAN  
BERDASARKAN TARIF  
YANG DIPUBLIKASIKAN  
SECARA LUAS



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKSANAKAN SESUAI  
DENGAN PRAKTIK BISNIS  
YANG SUDAH MAPAN



SUDAH DIATUR DALAM  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA

# 10 PENELITIAN

## PELAKSANA PENELITIAN

- Individu/kumpulan individu
- Kementerian/Lembaga/  
Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

## PEMILIHAN PELAKSANA PENELITIAN

- Kompetisi
- Penugasan

## KONTRAK PENELITIAN BERBASIS OUTPUT



# 11 E-MARKETPLACE

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

Jenis Katalog Elektronik:

- Katalog Nasional
- Katalog Sektoral
- Katalog Lokal



## 02 PERSYARATAN PENYEDIA



**PERPRES 54/2010**

**Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail**



**PERPRES 16/2018**

**Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana**

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

## 03 PENYEBUTAN MEREK

### PERPRES 54/2010

Penyebutan merek/produk tertentu untuk :

- suku cadang
- Barang/jasa pada Tender Cepat

### PERPRES 16/2018

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- komponen barang/jasa;
- suku cadang;
- bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- barang/jasa pada Tender Cepat.

# 04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri :

PERPRES 54/2010

**TKDN + BMP > 40%**

DAN

**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**

PERPRES 16/2018

**TKDN + BMP > 40%**

~~**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**~~



# 06 JAMINAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING

## PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan  
Dalam hal e-tendering  
(PERPRES 4/2015)



## PERPRES 16/2018

### JAMINAN PENAWARAN

- Jaminan Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pengadaan di atas Rp10 Miliar
- Nilai jaminan sebesar 1% -3% HPS

### JAMINAN SANGGAH BANDING

- Jaminan Sanggah Banding Untuk Pekerjaan Konstruksi
- Nilai Jaminan sebesar 1% HPS

# 10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI



## PERPRES 54/2010

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000

MAKS 50 JUTA



## PERPRES 16/2018

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000

MAKS 100 JUTA



# 12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

**PERPRES 54/2010**

20%

dari Kontrak tahun pertama

ATAU

15%

dari nilai Kontrak



**PERPRES 16/2018**

PALING TINGGI

15%

dari Nilai Kontrak

# 13 PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak

PERPRES 54/2010

~~LUMSUM~~

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMSUM  
DAN HARGA SATUAN

PERPRES 16/2018

SEMUA JENIS KONTRAK



# 14 PENYESUAIAN HARGA

## PERPRES 54/2010

LEBIH DARI 12 BULAN

Diberlakukan Pada Kontrak Tahun Jamak Yang Masa Pelaksanaannya

MULAI BULAN KE 13

Pemberlakukan Penyesuaian Harga

## PERPRES 16/2018

LEBIH DARI 18 BULAN

MULAI BULAN KE 13



PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA  
**15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

45

**PERPRES 54/2010**

Belum diatur secara khusus, Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria penunjukan langsung

**PERPRES 16/2018**

Diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus



# 16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

## PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERPRES 54/2010

> Rp 100 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 1 Trilyun

## JASA KONSULTANSI

PERPRES 54/2010

> Rp 10 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 25 Miliar

## BARANG

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

## JASA LAINNYA

PERPRES 54/2010

> Rp 20 Miliar



PERPRES 16/2018

> Rp 50 Miliar

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut

## PERPRES 54/2010

ULP memiliki Tugas Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang /Jasa

LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik



## PERPRES 16/2018

### UKPBJ MEMILIKI FUNGSI :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.



# 19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

## PERPRES 54/2010

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

## PERPRES 16/2018

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:

- 1 Tahun
- 2 Tahun



HERDIANA

*herdiana@kemdikbud.go.id*

t e r i m a

k a s i h